

EVALUASI DAMPAK FASILITAS KAWASAN BERIKAT MENGGUNAKAN *COST-BENEFIT ANALYSIS*

**Marsanto Adi Nurcahyo¹⁾; Rachmad Utomo²⁾; Sri Murwani³⁾; Yoke Ruminson Aritonang⁴⁾;
Nur Firman Iriansyah⁵⁾**

¹⁾ marsanto.adi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ rachmad.utomo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ srimurwani@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ yoke.aritonang@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Bea Cukai

⁵⁾ nur.firman@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Bea Cukai

Abstract

This study analyzes the effectiveness of bonded zone facility incentives in generating economic benefits for the country compared to the fiscal costs incurred. Using the Cost-Benefit Analysis method and the Net Present Value (NPV) approach, this research is conducted as a case study on three companies receiving bonded zone facilities, namely PT A, PT B, and PT C. The results show that PT A have a Benefit-Cost Ratio of 0.238, indicating that the economic benefits generated are still lower than the fiscal costs provided. In contrast, PT B and PT C has a Benefit-Cost Ratio of 2.235 and 1.575, demonstrating that this company provides greater economic benefits than the costs incurred by the government. These findings have implications for optimal tax policy, suggesting that fiscal incentives should be more selectively allocated based on long-term economic potential. Therefore, this study recommends periodic evaluations of bonded zone policies to ensure the effectiveness of fiscal incentives, enhance transparency in facility utilization, and design a stricter supervision mechanism. For future research, it is recommended to conduct an analysis of all companies receiving bonded zone facilities to obtain a more comprehensive understanding of the impact of this policy on the national economy.

Keywords : Bonded Zone, Cost-Benefit Analysis, Net Present Value, Optimal Taxation, Benefit-Cost Ratio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas fasilitas kawasan berikat dalam mendorong manfaat ekonomi bagi negara dibandingkan dengan biaya fiskal yang ditanggung. Metode yang digunakan ialah analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit Analysis*) dengan pendekatan *Net Present Value* (NPV). Penelitian dilakukan pada tiga perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, yaitu PT A, PT B, dan PT C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT A memiliki rasio manfaat-biaya (*Benefit-Cost Ratio*) sebesar 0,238, artinya manfaat ekonomi yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan dengan biaya fiskal yang ditanggung negara. Sebaliknya, PT B dan PT C memiliki rasio manfaat-biaya sebesar 2,235 dan 1,575, mengindikasikan bahwa perusahaan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan negara. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan perpajakan yang lebih selektif dan berbasis potensi manfaat jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi rutin atas kebijakan kawasan berikat, peningkatan transparansi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar cakupan diperluas ke seluruh perusahaan penerima fasilitas guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini bagi perekonomian nasional.

Kata Kunci : Kawasan Berikat, Analisis Biaya dan Manfaat, Net Present Value, Perpajakan Optimal, Benefit-Cost Ratio

PENDAHULUAN

Kawasan berikat merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis dalam perdagangan dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor manufaktur berorientasi ekspor. Melalui berbagai insentif fiskal seperti penangguhan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta kemudahan prosedural dalam proses ekspor-impor, fasilitas ini dirancang untuk mendorong efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam konteks integrasi global, kawasan berikat juga menjadi sarana penting untuk mempercepat arus barang dan mendukung partisipasi Indonesia dalam rantai pasok internasional (Aritonang, 2009). Kawasan berikat juga mempunyai peran dalam

mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasok global dengan mempercepat arus barang dan menekan biaya logistik bagi industri manufaktur (Paryadi & Salam, 2018).

Secara makro, kontribusi kawasan berikat terhadap perekonomian cukup signifikan. Perusahaan yang beroperasi di dalamnya menyumbang sekitar 1,62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 8,89% terhadap PDB sektor manufaktur, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang atau sekitar 9,89% dari total tenaga kerja industri manufaktur (Nugroho et al., 2018). Penerapan kebijakan kawasan berikat juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik dan operasional perusahaan, terutama dengan adanya skema Kawasan Berikat Mandiri yang mempercepat arus barang dan dokumen dalam rantai pasok global (Barlianto & Riesfandiari, 2021). Dengan demikian, kawasan berikat tidak hanya mendukung strategi industrialisasi, tetapi juga memperluas akses pasar internasional dan menarik investasi langsung asing (Harianto et al., 2013).

Namun, di sisi lain, pemberian insentif fiskal dalam kawasan berikat juga berimplikasi pada pengurangan potensi penerimaan negara, yang dalam konteks fiskal disebut sebagai belanja perpajakan. Belanja perpajakan merujuk pada penerimaan negara yang tidak dikumpulkan karena adanya kebijakan insentif perpajakan. Pada tahun 2023, belanja perpajakan diperkirakan mencapai Rp352,8 triliun atau sekitar 1,52% dari PDB (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut dari perspektif fiskal negara. Evaluasi yang komprehensif terhadap dampak fiskal menjadi penting untuk memastikan kebijakan ini tetap efisien dan berkelanjutan.

Berbagai studi terdahulu telah menelusuri manfaat kawasan berikat, seperti pengurangan biaya operasional (Aritenang, 2009), percepatan arus barang (Paryadi & Salam, 2018), serta kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (Nugroho et al., 2018). Namun, penelitian lain menyoroti sejumlah tantangan, termasuk belum optimalnya pengukuran dampak fiskal dan keterbatasan dalam metode evaluasi yang digunakan (Ratiyah et al., 2021). Selain itu, profitabilitas perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat bisa terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan pandemi (Fadjry, 2024). Kawasan berikat juga berkontribusi terhadap pengurangan biaya produksi dan peningkatan daya saing ekspor, tetapi dampak fiskalnya terhadap penerimaan negara masih belum dipahami secara komprehensif (Syafi'i et al., 2023). Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam metode evaluasi dampak ekonomi secara menyeluruh, yang menjadi kendala dalam mengukur keberlanjutan fasilitas ini (Saputra, 2023). Kesenjangan penelitian menunjukkan perlunya pendekatan evaluatif dari perspektif fiskal untuk mengukur efektivitas pemberian fasilitas tersebut.

Dari uraian kesenjangan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas fasilitas kawasan berikat dari sudut pandang fiskal negara dengan menggunakan pendekatan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melihat kawasan berikat tidak hanya dari perspektif perusahaan, tetapi juga dari sudut pandang pemerintah dalam konteks efisiensi belanja perpajakan.

Beberapa pertanyaan penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu (1) apa saja komponen biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) dari pemberian fasilitas kawasan berikat bagi negara? dan (2) bagaimana efektivitas fasilitas kawasan berikat ditinjau dari rasio manfaat dan biaya (*benefit-cost ratio*) yang ditanggung oleh negara dan diterima oleh perusahaan penerima insentif fiskal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, penelitian ini menyediakan data kuantitatif dan analisis evaluatif yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai efektivitas fiskal dari pemberian fasilitas kawasan berikat, serta sebagai masukan untuk perumusan atau penyesuaian kebijakan insentif di masa mendatang. Bagi pelaku usaha di kawasan berikat, hasil penelitian ini dapat memberikan

gambaran yang lebih terukur mengenai manfaat ekonomi (*cost and benefit*) dari pemanfaatan fasilitas tersebut sehingga membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait kelayakan dan optimalisasi penggunaan fasilitas. Dari sisi akademik, penelitian ini turut berkontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan fiskal berbasis *cost-benefit analysis*, khususnya dalam konteks fasilitas kepabeanan. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur ilmiah mengenai evaluasi program insentif pemerintah dalam mendukung daya saing industri dan efektivitas kebijakan fiskal.

KAJIAN LITERATUR

Teori Perpajakan Optimal

Teori perpajakan optimal membahas bagaimana sistem perpajakan dapat dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan meminimalkan distorsi ekonomi, sambil tetap memenuhi kebutuhan pendapatan negara dan menciptakan keadilan distribusi. Mirrlees (1971) mengembangkan model perpajakan optimal yang menyoroti *trade-off* antara efisiensi dan keadilan, serta perlunya pajak yang tidak menurunkan insentif seperti investasi, produksi, dan perdagangan. Diamond & Mirrlees (1971) juga menegaskan bahwa pajak tidak boleh mengganggu efisiensi produksi, terutama dalam konteks perdagangan internasional, agar negara tetap kompetitif.

Dalam konteks kawasan berikat, teori perpajakan digunakan untuk mengevaluasi apakah insentif fiskal yang diberikan menciptakan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kehilangan potensi penerimaan negara. Meskipun banyak studi seperti Zee et al. (2002) menekankan manfaat fiskal, studi lain seperti Keen (2001) mengingatkan adanya risiko erosi basis pajak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih hati-hati terkait desain insentif pajak.

Kawasan Berikat

Kawasan berikat merupakan bagian dari skema Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang dirancang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi, khususnya di sektor manufaktur. Insentif yang diberikan mencakup penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan yang digunakan untuk produksi. Fasilitas juga diberikan untuk transaksi domestik seperti tidak dipungut PPN atas pemasukan dari TLDDP, serta kemudahan dalam kegiatan subkontrak dan pergerakan barang antarpelaku industri dalam kawasan tersebut. Menurut Farole (2011), keberadaan kawasan berikat dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat integrasi ke dalam rantai nilai global. Di negara-negara berkembang, insentif ini sangat penting untuk menciptakan daya saing terhadap produsen dari negara maju yang memiliki akses teknologi dan infrastruktur yang lebih unggul.

Beberapa studi menunjukkan efektivitas insentif fiskal dalam mendorong investasi dan ekspor, seperti di Meksiko (Madani, 1999) dan India (Aggarwal, 2005). Namun, studi lain memperingatkan bahwa jika tidak dirancang secara hati-hati, insentif pajak dapat menyebabkan kehilangan penerimaan negara secara signifikan Keen (2001). Di Indonesia, penelitian terkait fasilitas Kawasan Berikat sebagian besar fokus pada manfaat perusahaan, namun belum banyak yang mengukur efektivitas fiskal secara menyeluruh dari perspektif pemerintah menggunakan pendekatan kuantitatif seperti *Cost-Benefit Analysis*. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut.

Metode *Cost-Benefit Analysis*

Cost-Benefit Analysis (CBA) merupakan alat evaluasi kebijakan ekonomi yang membandingkan total manfaat dan biaya suatu program untuk menilai apakah suatu kebijakan

menghasilkan nilai tambah bersih bagi masyarakat (Boardman et al., 2018). CBA mengkuantifikasi manfaat langsung dan tidak langsung serta menghitung nilai sekarang (*present value*) dari manfaat dan biaya selama periode tertentu. Dalam kebijakan fiskal, CBA digunakan untuk menilai efektivitas insentif pajak. Jika manfaat ekonomi seperti peningkatan ekspor, investasi, dan penciptaan lapangan kerja melebihi kehilangan pendapatan fiskal, maka kebijakan dapat dikatakan efektif.

Drèze & Stern (1987) menekankan pentingnya mempertimbangkan kelompok yang diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan fiskal. Studi yang dilakukan oleh Zee et al. (2002) menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak dapat meningkatkan investasi hanya jika kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan dampak jangka panjangnya terhadap penerimaan negara. Pendekatan ini berguna dalam mengevaluasi program belanja pajak (*tax expenditure*) agar tidak menimbulkan pemborosan fiskal (Jenkins & Harberger, 2018).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas Kawasan Berikat (KB) ataupun insentif kepabeanan lain seperti KITE memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, meskipun temuan tersebut tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa studi menyoroti dampak positif fasilitas KB terhadap produktivitas, ekspor, dan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Khizazi (2020) dalam studinya yang berjudul Analisis Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Berikat terhadap Produktivitas Perusahaan Manufaktur mengungkapkan bahwa reduksi tarif impor memiliki dampak positif terhadap produktivitas perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan dalam kawasan berikat dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2023) dalam Tinjauan Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat pada Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Subang Tahun 2022 mengonfirmasi bahwa fasilitas kawasan berikat berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan investasi, ekspor, pengembangan industri nasional, serta penyerapan tenaga kerja. Situmorang (2020) juga menyoroti dampak positif fasilitas kawasan berikat dan kebijakan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), yang berhasil menarik investasi senilai Rp178 triliun pada tahun 2017. Selain itu, fasilitas ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan tenaga kerja serta memperkuat jaringan bisnis di sekitar kawasan.

Namun demikian, tidak semua temuan mendukung dampak positif fasilitas KB secara menyeluruh. Beberapa studi mencatat adanya tantangan dalam efektivitas fiskal dan profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyo & Purwana (2021) menemukan bahwa terdapat variasi pengaruh antara jenis investasi dan umur fasilitas terhadap tingkat keuntungan perusahaan. Sementara itu, studi Syafi'i et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun fasilitas kepabeanan memiliki pengaruh positif terhadap ekspor, pengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan cenderung negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal dalam kawasan berikat perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang kebijakan, sejumlah penelitian mengungkapkan hambatan administratif dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian Wicaksono & Mangunsong (2021) mengenai kawasan berikat mengungkapkan bahwa dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja, jumlah produk, dan volume ekspor masih terbatas. Namun, dalam jangka pendek, kawasan ini mampu mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan. Studi ini juga menemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi dengan jaringan internasional, terutama dengan kepemilikan asing, memperoleh manfaat lebih besar dari skema kawasan berikat, terutama dalam meningkatkan margin ekspor. Namun, pemanfaatan fasilitas kawasan berikat secara

optimal masih menjadi tantangan, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Ardiansyah (2020), yang menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum memanfaatkan fasilitas ini sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, penelitian oleh Putri & Faradina (2023) menggarisbawahi ketidakjelasan dalam definisi hilirisasi sebagai kriteria pemberian fasilitas kawasan berikat oleh Bea Cukai, yang dapat memengaruhi kelayakan perusahaan dalam memperoleh insentif tersebut.

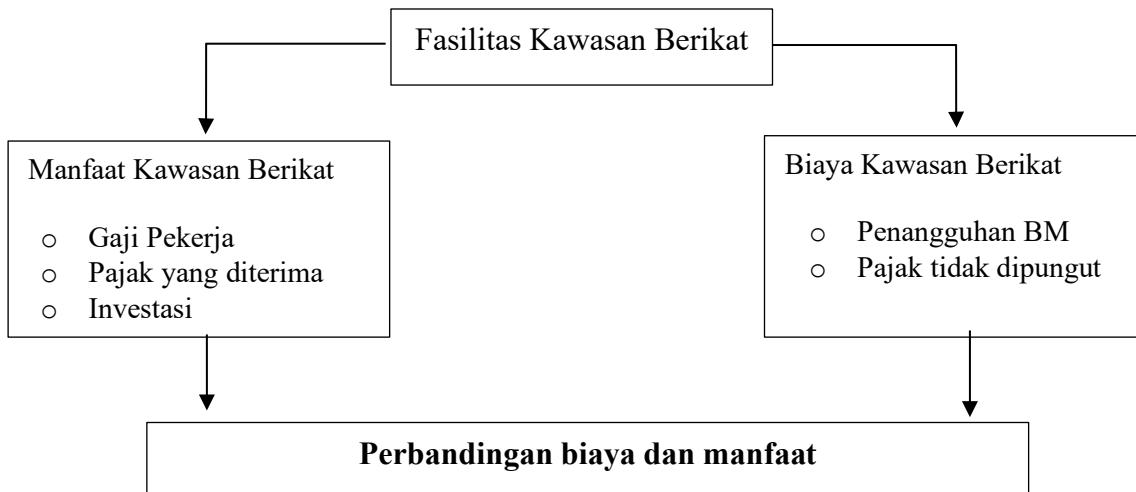
Secara umum, mayoritas studi menunjukkan bahwa fasilitas kawasan berikat berkontribusi positif terhadap ekspor, produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, efektivitas fasilitas ini terhadap profitabilitas dan kinerja fiskal perusahaan belum sepenuhnya konsisten, dan masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya. Ketidakefektifan administratif serta kriteria yang belum terstandarisasi menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dari skema insentif ini.

Meskipun beberapa studi telah menyinggung manfaat dan kendala fasilitas kawasan berikat, belum banyak penelitian yang secara langsung menilai efektivitas fasilitas ini dari perspektif fiskal negara, khususnya menggunakan pendekatan kuantitatif seperti *Cost-Benefit Analysis*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji dampak fiskal dari fasilitas kawasan berikat secara menyeluruh dan berbasis data empiris.

Framework Penelitian

Framework penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap pemberian fasilitas kawasan berikat sebagai bentuk belanja pajak (*tax expenditure*). Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah dapat berupa dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, tumbuhnya tingkat *employment*, bertambahnya nilai ekspor dan lainnya. Sementara itu, biaya yang timbul ialah adanya *tax expenditure*, yaitu potensi perpajakan yang hilang akibat adanya fasilitas dan hal yang lain. Peneliti akan membandingkan besar manfaat dan biaya tersebut yang dirasakan bagi pemerintah.

Gambar 1 Kerangka



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (CBA). CBA digunakan untuk menghitung dan membandingkan nilai manfaat dan biaya dari suatu kebijakan atau proyek dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi (Boardman et al., 2018). Dalam konteks ini, CBA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemberian fasilitas kawasan berikat dengan mengukur kontribusi perusahaan terhadap ekonomi nasional, seperti investasi, tenaga kerja, serta pembayaran pajak.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat Provinsi Banten. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap implementasi fasilitas dan dampaknya pada masing-masing perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: perusahaan telah menerima fasilitas kawasan berikat minimal lima tahun, aktif melakukan kegiatan ekspor-impor, dan mewakili karakteristik padat karya dan padat modal. Sebanyak tiga perusahaan dipilih sebagai objek studi kasus (PT A, PT B, dan PT C).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, dokumen kebijakan fiskal, serta publikasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data yang dianalisis mencakup data *cost* yang mencakup nilai fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pajak dalam rangka impor yang tidak dipungut, serta pajak dari barang dalam negeri yang tidak dipungut untuk perusahaan kawasan berikat dalam periode 2020-2024. Sementara itu data *benefit* mencakup total nilai upah/gaji pekerja, nilai investasi dan permodalan, nilai bahan baku lokal, serta pembayaran pajak oleh perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dalam periode yang sama.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan *Net Present Value* (NPV) dan *Benefit-Cost Ratio* (BCR) sebagai alat ukur efektivitas pemberian insentif fiskal.

Rumus yang digunakan:

- $NPV = \sum(Benefit_t - Cost_t) / (1 + r)^t$
- $BCR = NPV(\text{Benefit}) / NPV(\text{Cost})$

Keterangan:

t =tahun ke- t , r =tingkat diskonto, Benefit = nilai ekonomi yang diperoleh pemerintah dari kegiatan perusahaan, Cost = nilai fasilitas fiskal yang diberikan negara.

Tingkat diskonto yang digunakan adalah 6,5%, mengacu pada rata-rata suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) selama periode penelitian (2020–2024). Pemilihan tingkat diskonto ini bertujuan mencerminkan *time value of money* sesuai kondisi ekonomi makro nasional.

Langkah Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menghitung total nilai *cost* dan nilai *benefit* tahunan untuk masing-masing perusahaan (2020–2024). Berdasar data tersebut, dilakukan diskonto atas nilai *cost* dan *benefit* dengan tingkat diskonto 6,5% lalu dilakukan perhitungan NPV manfaat dan NPV biaya. Langkah selanjutnya ialah menghitung BCR setiap perusahaan dan melakukan perbandingan antarperusahaan untuk mengidentifikasi pola dan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian fasilitas kawasan berikat oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri berorientasi ekspor dengan memberikan berbagai insentif fiskal. Insentif tersebut mencakup penangguhan bea masuk serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) impor atas barang yang digunakan dalam proses produksi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berimplikasi pada potensi penerimaan negara yang tidak dapat terserap sepenuhnya, yang dalam konteks penelitian ini akan dikategorikan sebagai *cost*. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai fasilitas yang diberikan kepada perusahaan kawasan berikat mencapai Rp65,52 triliun pada tahun 2018. Nilai ini mengalami penurunan menjadi Rp57,69 triliun pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi Rp44,71 triliun pada tahun 2020. Namun, tren ini berbalik pada tahun 2022 dengan peningkatan fasilitas hingga Rp70,08 triliun dan mencapai Rp72,03 triliun pada tahun 2023.

Di sisi lain, keberadaan kawasan berikat juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, kontribusi pajak, peningkatan investasi, serta penguatan aktivitas ekonomi di sektor terkait. Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan kawasan berikat mencapai 1,52 juta orang pada tahun 2018. Jumlah ini meningkat menjadi 1,65 juta pada tahun 2019, meskipun sempat turun menjadi 1,53 juta pada tahun 2020. Tren positif kembali terlihat pada tahun 2021 dengan peningkatan tenaga kerja hingga 1,93 juta orang, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 1,75 juta pada tahun 2022. Dari segi kontribusi fiskal, pembayaran pajak dari perusahaan di kawasan berikat mencapai Rp75 triliun pada tahun 2018, tetapi mengalami penurunan drastis menjadi Rp39 triliun pada tahun 2019 dan Rp33 triliun pada tahun 2020. Tren ini berlanjut pada tahun 2021 dengan pembayaran pajak sebesar Rp24 triliun sebelum akhirnya meningkat kembali pada tahun 2022 mencapai Rp94 triliun. Selain itu, investasi di kawasan berikat terus bertambah setiap tahunnya, mencerminkan potensi sektor ini sebagai destinasi bisnis yang menarik. Pada tahun 2018, investasi di kawasan berikat bertambah sebesar Rp111,54 triliun, meningkat signifikan menjadi Rp228,84 triliun pada tahun 2019. Fluktuasi terjadi pada tahun 2020 dengan tambahan investasi sebesar Rp204,13 triliun, sementara pada tahun 2021 turun menjadi Rp133,83 triliun sebelum kembali naik menjadi Rp194,84 triliun pada tahun 2022.

Dari gambaran perusahaan kawasan berikat seluruh Indonesia tersebut, dalam penelitian ini mencoba untuk membandingkan kondisi biaya dan manfaat dari suatu perusahaan kawasan berikat. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu perusahaan yang ada di wilayah Banten dan bersedia untuk dilakukan pengambilan data. Perusahaan yang ditetapkan menjadi sampel adalah PT A, PT B dan PT C.

Hasil dan Pembahasan *Cost Benefit Analysis* PT A

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa PT A telah mendapatkan fasilitas kawasan berikat sejak tahun 2015. PT A bergerak dibidang pengolahan makanan. PT A melakukan impor bahan baku, kemudian melakukan pengolahan menjadi bahan baku, selanjutnya hasil produksi dilakukan ekspor ke Eropa, Asia dan Amerika.

Berdasarkan data nilai ekspor dan impor perusahaan selama periode 2020–2024, terlihat adanya variasi signifikan dalam performa perdagangan internasional. PT A mengalami pertumbuhan ekspor yang cukup positif, dimulai dari Rp382,8 miliar di tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp962,1 miliar di tahun 2024. Namun, nilai impor PT A juga relatif tinggi, terutama pada tahun 2021 yang mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun sehingga menciptakan tekanan terhadap neraca perdagangan perusahaan tersebut dalam beberapa tahun. Secara keseluruhan, PT A mengalami defisit perdagangan sebesar kurang lebih Rp87,97 miliar dalam periode lima tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya impor di tahun 2021, yang melampaui

nilai ekspor. Meskipun di beberapa tahun lainnya PT A mencatat surplus, total kumulatifnya masih menunjukkan ketergantungan pada bahan atau barang dari luar negeri.

PT A telah memanfaatkan berbagai fasilitas kawasan berikat yang diberikan oleh pemerintah, yang terdiri dari penangguhan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta pajak dalam negeri yang tidak dipungut. Fasilitas perpajakan yang diterima PT A menjadi *cost* bagi negara atau pemerintah. Data yang dikumpulkan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dalam nilai *cost* yang diterima oleh PT A melalui fasilitas ini.

Pada tahun 2020, total nilai fasilitas yang diberikan negara untuk dinikmati PT A mencapai Rp94,71 miliar, dengan komponen terbesar berasal dari pajak dalam negeri yang tidak dipungut sebesar Rp36,60 miliar dan PPN impor yang tidak dipungut sebesar Rp35,10 miliar. Pada tahun 2021, terdapat lonjakan signifikan dalam total fasilitas yang diberikan, yaitu mencapai Rp218,06 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan nilai penangguhan bea masuk yang mencapai Rp55,58 miliar serta nilai PPN impor yang tidak dipungut sebesar Rp128,65 miliar. Namun, tren ini mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Total fasilitas yang diterima PT A pada tahun 2022 turun menjadi Rp147,38 miliar dan terus menurun menjadi Rp104,88 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya kemungkinan perubahan kebijakan atau berkurangnya volume impor bahan baku dan barang modal yang dilakukan oleh perusahaan.

Meskipun sempat mengalami penurunan dalam dua tahun sebelumnya, pada tahun 2024 nilai fasilitas kembali meningkat menjadi Rp164,11 miliar. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan nilai penangguhan bea masuk yang mencapai Rp44,53 miliar serta nilai PPN impor tidak dipungut yang naik menjadi Rp94,78 miliar. Sementara itu, nilai pajak dalam negeri yang tidak dipungut relatif rendah dibandingkan tahun 2020, hanya mencapai Rp1,09 miliar pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas kawasan berikat oleh PT A mengalami variasi dari tahun ke tahun. Lonjakan signifikan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan fasilitas kepabeanan yang diberikan pemerintah memiliki dampak yang cukup besar terhadap perusahaan, terutama dalam mengurangi beban pajak atas bahan baku dan barang modal impor. Namun, penurunan fasilitas pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya dinamika dalam kebijakan fiskal maupun strategi bisnis perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Sementara itu, negara atau pemerintah memperoleh berbagai manfaat dari pemanfaatan fasilitas kawasan berikat, yang meliputi total nilai upah/gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, serta kontribusi perusahaan terhadap pembayaran pajak, termasuk pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Secara umum, total nilai *benefit* yang diperoleh negara mengalami tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total benefit mencapai Rp39,67 miliar, dengan komponen terbesar berasal manfaat tenaga kerja dari total nilai upah/gaji sebesar Rp29,38 miliar dan nilai bahan baku lokal sebesar Rp7,33 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022, total nilai benefit sedikit menurun menjadi Rp37,43 miliar dan Rp36,99 miliar, terutama akibat berkurangnya total nilai upah/gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan adanya potensi efisiensi tenaga kerja atau perubahan strategi operasional perusahaan.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun sebelumnya, total benefit yang diperoleh negara kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp37,18 miliar. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penggunaan bahan baku lokal yang mencapai Rp8,48 miliar, yang merupakan angka tertinggi selama periode penelitian. Namun, pada tahun 2024, total nilai benefit mengalami penurunan signifikan menjadi Rp24,46 miliar, terutama disebabkan oleh

turunnya nilai upah/gaji yang hanya mencapai Rp13,67 miliar. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja atau perubahan kebijakan perusahaan dalam struktur penggajian.

Data terkait kontribusi pajak yang dibayarkan oleh PT A juga menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, perusahaan membayar pajak sebesar Rp2,96 miliar, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp2,28 miliar pada tahun 2021, sebelum kembali meningkat menjadi Rp3,28 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pembayaran pajak kembali menurun menjadi Rp2,54 miliar. Namun, di tahun 2024, terdapat lonjakan signifikan dalam pembayaran pajak, mencapai Rp6,67 miliar, yang menunjukkan adanya peningkatan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara dan daerah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh negara dari PT A atas fasilitas kawasan berikat mengalami variasi dari tahun ke tahun. Penurunan nilai upah/gaji serta bahan baku lokal di tahun 2024 dapat menjadi indikator adanya tantangan bisnis atau perubahan strategi operasional yang memengaruhi struktur biaya perusahaan. Sementara itu, peningkatan pembayaran pajak di tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mungkin mengalami efisiensi di beberapa aspek, kontribusi fiskal terhadap pemerintah tetap meningkat.

Data benefit diperoleh berdasarkan total nilai upah/gaji yang dibayarkan, nilai bahan baku lokal, dan pembayaran pajak per tahun. Berdasarkan data biaya dan data manfaat di atas, dengan menggunakan analisis finansial *Net Present Value* (NPV) dari seluruh biaya dan manfaat dengan menggunakan tingkat bunga 6% (bunga acuan BI November tahun 2024) maka diperoleh hasil sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1
Perhitungan *Benefit Cost Ratio* PT A

Tahun	Manfaat	NPV Manfaat	Biaya	NPV Biaya
2020	39.671.012.508	31.423.157.622	94.708.139.180	75.017.716.902
2021	37.439.235.719	31.434.704.252	218.064.286.974	183.090.980.284
2022	36.988.349.459	32.919.499.341	147.383.814.139	131.171.069.899
2023	37.175.468.722	35.071.196.908	104.880.557.063	98.943.921.758
2024	24.463.137.228	24.463.137.228	164.112.217.007	164.112.217.007
Total		155.311.695.350		652.335.905.850
Total NPV Manfaat	155.311.695.350			
Total NPV Biaya	652.335.905.850			
<i>Benefit Cost Ratio</i>	0.238			

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode *Net Present Value* (NPV), analisis manfaat dan biaya dari fasilitas kawasan berikat terhadap PT A menunjukkan bahwa nilai manfaat yang diperoleh pemerintah dalam lima tahun terakhir masih lebih kecil dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Hal ini tercermin dari rasio manfaat-biaya atau *Benefit-Cost Ratio* (BCR) yang hanya mencapai 0,238, yang berarti bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan hanya menghasilkan manfaat sebesar Rp0,238 bagi pemerintah.

Secara lebih rinci, total NPV manfaat yang dihasilkan PT A selama periode 2020–2024 mencapai Rp155,31 miliar, sedangkan total NPV biaya yang ditanggung pemerintah dalam bentuk fasilitas kepabeanan mencapai Rp652,34 miliar. Dari tahun ke tahun, selisih antara manfaat dan biaya cenderung signifikan. Pada tahun 2020, misalnya, NPV manfaat tercatat

sebesar Rp31,42 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan NPV biaya yang mencapai Rp75,02 miliar. Selisih ini semakin membesar pada tahun 2021, yaitu NPV biaya melonjak hingga Rp183,09 miliar, sementara NPV manfaat hanya berada di angka Rp31,43 miliar.

Meskipun terdapat sedikit peningkatan NPV manfaat pada tahun 2022 dan 2023, yaitu Rp32,92 miliar dan Rp35,07 miliar, angka tersebut tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan NPV biaya, yang masih berada di atas Rp98,94 miliar. Pada tahun 2024, NPV manfaat mengalami penurunan signifikan menjadi Rp24,46 miliar, sedangkan NPV biaya justru meningkat menjadi Rp164,11 miliar, yang menyebabkan rasio manfaat terhadap biaya tetap berada di tingkat yang rendah.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa secara finansial, fasilitas kawasan berikat yang diterima PT A belum memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. BCR yang kurang dari satu menunjukkan bahwa program ini belum efisien secara ekonomi, setidaknya dalam periode waktu yang dianalisis. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meninjau kembali efektivitas kebijakan fasilitas kawasan berikat, baik dari sisi pemberian insentif maupun dari strategi optimalisasi pemanfaatan oleh perusahaan penerima fasilitas.

Dari perspektif Teori Perpajakan Optimal, hasil ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam desain insentif fiskal yang diberikan dalam skema kawasan berikat. Menurut teori ini, sistem pajak yang ideal seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa menciptakan distorsi yang berlebihan terhadap penerimaan negara (Mirrlees, 1971). Dalam konteks PT A, insentif pajak yang diberikan melalui penangguhan bea masuk, pembebasan PPN, dan PPh impor bertujuan untuk merangsang investasi dan meningkatkan daya saing industri. Namun, ketika total manfaat yang diperoleh masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang ditanggung negara, maka kebijakan insentif ini perlu dikaji ulang agar lebih efisien dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Keen (2001) menekankan bahwa dalam jangka panjang, insentif pajak yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan erosi basis pajak dan mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai sektor-sektor produktif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi kebijakan insentif yang dapat memastikan bahwa fasilitas kawasan berikat tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara.

Hasil dan Pembahasan *Cost Benefit Analysis* PT B

Sampel berikutnya ialah PT B, yang telah menjadi perusahaan kawasan berikat sejak tahun 2011. PT B bergerak di bidang produksi alas kaki. Karakteristik dari PT B ialah padat karya, artinya mempunyai karyawan yang jumlahnya ribuan. Selain itu, PT B mempunyai karakteristik produksi barang berdasarkan pemesanan yang bersifat *makloon*. Bahan baku didatangkan dari luar negeri kemudian diolah dan selanjutnya dikirim kembali ke luar negeri dalam bentuk barang jadi.

Berdasarkan data nilai ekspor dan impor selama periode 2020–2024, PT B menunjukkan kinerja ekspor yang sangat kuat dan stabil dengan tren kenaikan yang konsisten dari Rp 693 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp 1,1 triliun pada tahun 2023. Performa ekspor PT B secara umum selalu lebih tinggi dibandingkan impornya, menandakan kontribusi positif terhadap devisa negara dan potensi sebagai sumber manfaat fiskal dan ekonomi. Misalnya, pada tahun 2023, nilai ekspor mencapai Rp 1,11 triliun, jauh melampaui nilai impornya sebesar Rp 608 miliar. PT B menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan mencatat surplus perdagangan sebesar Rp 2,26 triliun selama lima tahun. Ini menunjukkan bahwa PT B secara konsisten lebih banyak menghasilkan devisa melalui ekspor dibandingkan dengan

penggunaan devisa untuk impor. Ini bisa menjadi indikator bahwa PT B memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh, total biaya atau *cost* yang ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas kawasan berikat untuk PT B mengalami tren kenaikan selama periode 2020 hingga 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Biaya ini terdiri dari nilai penangguhan bea masuk serta nilai pajak dalam rangka impor yang tidak dipungut, yang diberikan sebagai insentif bagi perusahaan dalam kawasan berikat.

Pada tahun 2020, total biaya yang diberikan kepada PT B tercatat sebesar Rp83,40 miliar, dengan komponen terbesar berasal dari nilai pajak dalam rangka impor yang tidak dipungut, yakni Rp45,79 miliar. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp100,30 miliar, dan terus bertambah secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing mencapai Rp125,78 miliar dan Rp169,56 miliar. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan pemanfaatan fasilitas kawasan berikat oleh PT B, terutama dalam bentuk penangguhan bea masuk dan insentif pajak impor yang semakin besar. Namun, pada tahun 2024, total biaya mengalami penurunan menjadi Rp116,03 miliar, yang kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas impor atau perubahan kebijakan insentif yang diterapkan perusahaan.

Secara keseluruhan, tren kenaikan biaya ini menunjukkan bahwa PT B memanfaatkan fasilitas kawasan berikat dengan intensitas yang meningkat dalam periode tertentu, tetapi masih memerlukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas manfaat ekonomi yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh, manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh PT B dalam periode 2020 hingga 2024 mencerminkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, khususnya melalui tiga komponen utama, yaitu pembayaran upah/gaji karyawan, penggunaan bahan baku lokal, dan pembayaran pajak tahunan. Secara keseluruhan, nilai total manfaat dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang relatif tinggi, meskipun terdapat fluktuasi dalam komponen tertentu.

Pada tahun 2020, total manfaat yang dihasilkan PT B mencapai Rp 217,10 miliar, yang sebagian besar berasal dari nilai upah/gaji sebesar Rp 222,65 miliar. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan manfaat menjadi Rp 278,42 miliar, dengan kontribusi bahan baku lokal sebesar Rp 18,70 miliar dan pembayaran pajak yang mulai terlihat sebesar Rp 3,32 miliar.

Pada tahun 2022, total manfaat sedikit menurun menjadi Rp 268,76 miliar, dipengaruhi oleh munculnya nilai negatif dalam komponen pajak sebesar Rp 1,27 miliar, yang dapat disebabkan oleh restitusi atau pembebasan pajak tertentu. Meskipun demikian, nilai bahan baku lokal tetap menunjukkan peningkatan, yaitu Rp 20,67 miliar. Tahun 2023 mencatat manfaat tertinggi selama lima tahun, yaitu Rp 308,86 miliar, terutama didorong oleh kenaikan upah/gaji dan pembayaran pajak sebesar Rp 11,45 miliar. Pada tahun 2024, meskipun nilai upah/gaji menurun menjadi Rp 205,99 miliar, peningkatan tajam dalam penggunaan bahan baku lokal (Rp 46,76 miliar) dan pembayaran pajak (Rp 14,05 miliar) menjaga nilai total manfaat tetap tinggi, yaitu Rp 266,81 miliar. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa PT B memberikan manfaat yang signifikan dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat dan stabilitas pasar tenaga kerja.

Berdasarkan data biaya dan data manfaat di atas, dengan menggunakan analisis finansial *Net Present Value* (NPV) dari seluruh biaya dan manfaat dengan menggunakan tingkat bunga 6% (bunga acuan BI November tahun 2024) maka diperoleh hasil sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2
Perhitungan Benefit Cost Ratio PT B

Tahun	Manfaat	NPV Manfaat	Biaya	NPV Biaya
2020	217,100,895,663	171,964,243,738	83.402.718.740	66.062.765.011
2021	278,418,485,550	233,765,529,221	100.303.951.325	84.217.131.697
2022	268,757,474,831	239,193,195,827	125.782.228.558	111.945.735.634
2023	308,861,756,484	291,379,015,551	169.562.484.017	159.964.607.563
2024	266,809,631,422	266,809,631,422	116.028.837.734	116.028.837.734
Total		1,203,111,615,758		538.219.077.638
Total NPV Manfaat	1,203,111,615,758			
Total NPV Biaya	538.219.077.638			
Benefit Cost Ratio	2,235			

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Hasil perhitungan *Net Present Value* (NPV) menunjukkan bahwa fasilitas kawasan berikat yang diberikan kepada PT B menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh negara. Dalam periode lima tahun (2020–2024), total NPV manfaat yang diterima negara dari PT B mencapai Rp 1,20 triliun, sementara NPV biaya yang dikeluarkan oleh negara tercatat sebesar Rp 538,22 miliar. Dengan demikian, diperoleh *Benefit-Cost Ratio* (BCR) sebesar 2,235, yang berarti bahwa setiap Rp1 biaya insentif yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan manfaat sebesar Rp2,23 bagi negara dan masyarakat.

Nilai BCR yang tinggi ini menunjukkan bahwa fasilitas kawasan berikat yang diterima PT B dapat dikategorikan efisien dan berhasil dalam mendorong manfaat ekonomi, baik melalui penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, maupun kontribusi pajak. Temuan ini juga sejalan dengan prinsip dalam teori perpajakan optimal, yaitu insentif fiskal seharusnya diberikan dengan mempertimbangkan rasio manfaat terhadap biaya secara menyeluruh. Menurut teori ini, kebijakan pajak yang ideal ialah yang mampu memaksimalkan kesejahteraan sosial tanpa menciptakan distorsi berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Dengan rasio manfaat yang melebihi dua kali lipat dari biaya yang dikeluarkan, pemberian insentif kepada PT B mencerminkan penggunaan fiskal yang efisien dan sesuai dengan kerangka perpajakan optimal. Temuan ini mendukung perlunya pendekatan berbasis kinerja dalam pemberian insentif, agar kebijakan fiskal benar-benar berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Hasil dan Pembahasan Cost Benefit Analysis PT C

Sampel berikutnya adalah PT C, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. PT C merupakan perusahaan yang memproduksi *rig* yang digunakan untuk produksi minyak atau gas bumi.

Berdasarkan data nilai ekspor dan impor selama periode 2020–2024, PT C menunjukkan pola yang fluktuatif. Ekspor mulai tercatat pada tahun 2021 dan mengalami lonjakan tajam di tahun 2022 hingga mencapai Rp 1,43 triliun, sebelum turun drastis pada 2023 dan 2024. Di sisi lain, nilai impor PT C mencapai puncaknya juga pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp903 miliar, menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Ketidakseimbangan antara ekspor dan impor di tahun-tahun tertentu disebabkan oleh karakteristik dari PT C yang memiliki jangka waktu produksi lebih dari setahun. Hal tersebut

membuat dalam jangka waktu tertentu hanya melakukan impor atau pembelian bahan baku, tetapi pada saat tertentu akan melakukan penjualan produksi atau ekspor dengan nilai yang sangat besar. PT C secara keseluruhan mencatat surplus perdagangan sebesar Rp728,52 miliar. Hal ini menandakan adanya potensi besar dalam ekspor, meskipun keberlanjutannya perlu diperkuat karena adanya fluktuasi yang tajam setiap tahunnya.

Dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk insentif fiskal bagi PT C melalui skema kawasan berikat. Berdasarkan data yang diperoleh, biaya yang diberikan terdiri dari nilai penangguhan bea masuk, nilai pajak dalam rangka impor yang tidak dipungut, serta pajak dari barang dalam negeri yang tidak dipungut.

Pada tahun 2020, total biaya atau *cost* yang dikeluarkan negara untuk PT C tercatat sebesar Rp25,44 miliar, dengan komponen terbesar berasal dari pajak barang dalam negeri yang tidak dipungut, yaitu Rp16,83 miliar. Pada tahun 2021, jumlah total insentif fiskal yang diberikan mengalami penurunan menjadi Rp21,31 miliar. Namun, pada 2022, terjadi lonjakan yang signifikan dalam nilai insentif, yaitu mencapai Rp243,73 miliar, yang sebagian besar berasal dari pajak dalam rangka impor yang tidak dipungut, yakni Rp135,28 miliar, serta nilai penangguhan bea masuk sebesar Rp99,38 miliar. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan kembali dalam biaya fasilitas, masing-masing menjadi Rp12,23 miliar dan Rp18,55 miliar. Fluktuasi dalam jumlah insentif ini menunjukkan bahwa besaran fasilitas yang diberikan sangat bergantung pada tingkat impor barang modal dan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi apakah fasilitas ini telah menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam penelitian ini, manfaat ekonomi yang diterima negara dari PT C dianalisis berdasarkan nilai upah/gaji yang dibayarkan, nilai investasi dan permodalan, serta penggunaan bahan baku lokal. Manfaat ini mencerminkan kontribusi PT C terhadap perekonomian nasional dalam konteks kawasan berikat. Pada tahun 2020, total manfaat yang dihasilkan PT C mencapai Rp284,73 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari penggunaan bahan baku lokal sebesar Rp168,25 miliar, serta nilai upah/gaji yang mencapai Rp107,39 miliar. Namun, pada 2021, total manfaat mengalami penurunan tajam menjadi Rp76,64 miliar, dengan nilai upah/gaji turun ke Rp39,25 miliar, sementara penggunaan bahan baku lokal berkurang menjadi Rp34,12 miliar. Pada 2022, manfaat kembali meningkat menjadi Rp104,99 miliar, didukung oleh kenaikan dalam penggunaan bahan baku lokal sebesar Rp83,96 miliar.

Pada 2023, total manfaat yang diberikan PT C kepada negara sebesar Rp55,81 miliar, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari upah/gaji dan bahan baku lokal. Sementara itu, pada 2024, manfaat yang diterima mengalami penurunan drastis ke Rp12,86 miliar, yang sepenuhnya berasal dari bahan baku lokal. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya perubahan strategi bisnis, efisiensi operasional, atau ketergantungan perusahaan terhadap bahan impor dibandingkan bahan baku lokal.

Fluktuasi dalam manfaat yang dihasilkan PT C menunjukkan bahwa meskipun fasilitas kawasan berikat memberikan dampak positif, tetapi nilai manfaat yang dihasilkan belum selalu sebanding dengan biaya insentif yang diberikan pemerintah. Hal ini memerlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan insentif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Tabel 3
Perhitungan *Benefit Cost Ratio* PT C

Tahun	Manfaat	NPV Manfaat	Biaya	NPV Biaya
2020	284.732.296.007	225.534.647.386	25.443.455.379	20.153.599.776
2021	76.644.834.608	64.352.481.082	21.311.047.123	17.893.166.106
2022	104.985.506.614	93.436.727.140	243.733.070.517	216.921.565.074
2023	55.809.594.577	52.650.560.922	12.226.187.030	11.534.138.707
2024	12.860.515.872	12.860.515.872	18.546.912.746	18.546.912.746
Total		448.834.932.402		285.049.382.410
Total NPV Manfaat	448.834.932.402			
Total NPV Biaya	285.049.382.410			
Benefit Cost Ratio	1.575			

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis *Benefit-Cost Ratio* (BCR) menggunakan metode *Net Present Value* (NPV), PT C menunjukkan hasil yang positif dalam pemanfaatan fasilitas kawasan berikat. Total NPV manfaat yang diterima negara dari PT C selama periode 2020-2024 mencapai Rp448,83 miliar, sedangkan total NPV biaya yang dikeluarkan pemerintah adalah Rp285,05 miliar. Dengan perbandingan ini, BCR PT C mencapai 1,575, yang berarti bahwa setiap Rp1 insentif yang diberikan oleh pemerintah menghasilkan manfaat ekonomi sebesar Rp1,58.

Dari data tahun ke tahun, tahun 2020 mencatat manfaat ekonomi tertinggi, dengan NPV manfaat mencapai Rp225,53 miliar, jauh melampaui biaya yang dikeluarkan sebesar Rp20,15 miliar. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam biaya yang dikeluarkan oleh negara hingga Rp216,92 miliar, sedangkan manfaat yang diterima hanya sebesar Rp93,43 miliar, menyebabkan rasio keuntungan menjadi kurang optimal di tahun tersebut. Pada tahun 2024, baik biaya maupun manfaat mengalami penurunan, tetapi rasio manfaat terhadap biaya masih tetap berada di atas 1.

Terdapat fluktuasi manfaat ekonomi yang signifikan pada PT C, terutama penurunan drastis pada tahun 2024. Penurunan total manfaat dari Rp55,81 miliar di 2023 menjadi hanya Rp12,86 miliar pada 2024 terjadi karena karakteristik model bisnis yang dilakukan oleh PT C memiliki siklus produksi panjang dan padat modal. Hal itu membuat PT C tidak selalu menghasilkan produk dalam satu tahun kalender. Proses produksi bisa dilakukan melebihi satu tahun sehingga saat penjualan terlihat ekspor yang besar, sementara saat produksi terlihat hanya pembelian bahan baku saja.

Dalam perspektif teori perpajakan optimal, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diberikan melalui fasilitas kawasan berikat kepada PT C masih efektif dalam mendorong manfaat ekonomi secara keseluruhan. Menurut teori perpajakan optimal, pajak harus dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan distorsi ekonomi sambil tetap memberikan manfaat fiskal bagi negara. Dengan nilai $BCR > 1$, insentif yang diberikan kepada PT C dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang menguntungkan, karena manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Namun, fluktuasi tahunan dalam manfaat dan biaya mengindikasikan perlunya pengawasan lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan ini, terutama pada tahun-tahun saat biaya meningkat tetapi manfaat tidak meningkat secara proporsional.

Komparasi Antarperusahaan

Tabel berikut merangkum nilai NPV manfaat, NPV biaya, dan rasio BCR dari ketiga perusahaan:

Tabel 4
Perbandingan Hasil *Benefit Cost Ratio* Antarperusahaan

Perusahaan	NPV Manfaat (Rp)	NPV Biaya (Rp)	BCR	Sektor
PT A	155,31 M	652,34 M	0,238	Makanan
PT B	1.203,11 M	538,22 M	2,235	Alas kaki (padat karya)
PT C	448,83 M	285,05 M	1,575	Konstruksi (padat modal)

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Tabel 4 menunjukkan perbedaan efisiensi fiskal yang signifikan. PT B, sebagai perusahaan padat karya dengan sistem produksi *makloon*, memberikan BCR tertinggi (>2), yang menandakan bahwa setiap Rp1 insentif menghasilkan manfaat lebih dari dua kali lipat. Hal ini disebabkan oleh konsistensi ekspor, surplus perdagangan, dan besarnya penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, PT A memiliki rasio BCR yang jauh di bawah satu. Ketergantungan terhadap bahan impor serta defisit perdagangan selama lima tahun menjadikan total *cost* melebihi manfaat yang diterima negara. Ini mengindikasikan bahwa sektor industri olahan makanan berbasis ekspor memerlukan strategi optimalisasi tambahan agar lebih efisien.

PT C berada di antara keduanya, dengan $BCR > 1$, tetapi berfluktuasi tajam. Hal ini wajar karena karakteristik bisnis proyek skala besar menyebabkan manfaat dan biaya tidak merata setiap tahun. Meski demikian, total surplus perdagangan dan NPV manfaat tetap menunjukkan hasil positif dalam jangka lima tahun.

Dimensi Non-Finansial dan Dampak Jangka Panjang

Selain manfaat finansial yang terukur melalui indikator NPV dan BCR, fasilitas kawasan berikat juga memberikan kontribusi penting dalam bentuk manfaat nonfinansial yang berdampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Salah satu dimensi utama ialah penyerapan tenaga kerja. PT B menunjukkan kontribusi signifikan melalui penciptaan lapangan kerja yang konsisten, terutama di sektor padat karya. Hal ini secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat dan berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran di wilayah sekitarnya.

Selain itu, efek pengganda ekonomi juga terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap layanan pendukung seperti logistik, keamanan, katering, dan penyedia bahan baku lokal, yang memperkuat ekosistem industri secara keseluruhan. Di sisi lain, perusahaan seperti PT C yang bergerak di industri manufaktur alat berat memberikan dampak positif melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keterlibatan pekerja lokal dalam proses produksi berteknologi tinggi memungkinkan alih pengetahuan dan peningkatan keterampilan yang berdampak jangka panjang terhadap daya saing nasional. Meskipun manfaat ini tidak langsung tercermin dalam indikator fiskal, dampaknya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dimensi nonfinansial perlu dipertimbangkan secara lebih serius dalam evaluasi kebijakan fasilitas fiskal seperti kawasan berikat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian fasilitas kawasan berikat perlu diarahkan secara lebih strategis agar manfaatnya tidak hanya maksimal dari sisi fiskal, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah

perlunya penajaman sektor prioritas. Industri padat karya dengan kinerja ekspor yang stabil, seperti sektor alas kaki (contohnya PT B), terbukti memberikan rasio manfaat terhadap biaya (BCR) yang tinggi serta kontribusi signifikan melalui penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, industri dengan karakteristik proyek jangka panjang dan siklus bisnis yang tidak reguler, seperti PT C, tetap perlu difasilitasi mengingat potensi jangka panjangnya, tetapi harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih cermat untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya. Implikasi kedua ialah pentingnya mengintegrasikan dimensi nonfinansial dalam proses evaluasi fasilitas fiskal. Indikator seperti penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap pengembangan ekosistem industri lokal, serta potensi transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM perlu dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan fasilitas kawasan berikat tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal semata, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini mengidentifikasi faktor biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dalam pemberian fasilitas kawasan berikat. Faktor yang menjadi *cost* bagi negara berupa insentif fiskal seperti pembebasan bea masuk dan pajak impor. Faktor yang menjadi *benefit* bagi pemerintah meliputi kontribusi terhadap pajak, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Analisis rasio manfaat terhadap biaya (BCR) menunjukkan variasi efektivitas kebijakan antarperusahaan. PT A memiliki BCR di bawah 1, menandakan manfaat yang diperoleh belum sebanding dengan biaya fiskal yang dikeluarkan, sedangkan PT B dan PT C menunjukkan nilai BCR di atas 1, yang mencerminkan efektivitas pemberian insentif. Hasil ini menekankan pentingnya penerapan prinsip perpajakan optimal dalam desain kebijakan kawasan berikat. Untuk itu, fasilitas fiskal perlu diberikan secara selektif dan berbasis kinerja penerima.

Rekomendasi dari penelitian ini ialah agar pemerintah menerapkan sistem evaluasi berkala berbasis rasio BCR, mewajibkan pelaporan tahunan BCR oleh perusahaan penerima insentif serta memberikan pendampingan teknis kepada perusahaan dengan BCR rendah agar manfaat yang dihasilkan dapat ditingkatkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data keuangan perusahaan dan variasi model bisnis antar entitas yang menyulitkan generalisasi. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan cakupan data lebih luas dan variabel kontrol tambahan direkomendasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penelitian longitudinal untuk mengamati bagaimana dampak fasilitas kawasan berikat berkembang dalam periode waktu yang lebih panjang. Selain itu dapat melakukan *cost benefit analysis* terhadap seluruh perusahaan kawasan berikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, A. (2005). Performance of export processing zones: A comparative analysis of India, Sri Lanka and Bangladesh. *Working paper*.
- Ardiansyah, B. G. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Berikat Oleh Industri Tertentu Di Kpp Pratama Karawang Selatan. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2(1), 250–272.
- Aritenang, A. F. (2009). A comparative study on free trade zone: development through spatial economic concentration. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 20(2), 95–108.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). Laporan Belanja Perpajakan 2023, Tax Expenditure Report 2023.

- Barlianto, A. D., & Riesfandiari, I. (2021). Efektivitas Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 3(1), 136–151.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. *Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement*.
- Diamond, P. A., & Mirrlees, J. A. (1971). Optimal taxation and public production I: Production efficiency. *The American Economic Review*, 61(1), 8–27.
- Drèze, J., & Stern, N. (1987). The theory of cost-benefit analysis. In *Handbook of public economics (Vol. 2, pp. 909–989)*. Elsevier.
- Fadjry, S. H. (2024). Pengaruh Biaya Produksi, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Farole, T. (2011). Special economic zones in Africa: comparing performance and learning from global experiences. *World Bank Publications*.
- Harianto, H., Vidyatmoko, D., & Rosadi, H. Y. (2013). Determinan Inovasi Teknologi dan Kebijakan Pengembangan pada Industri Pangan (Determinants of Technological Innovation and Development Policy in Food Industry). *JURNAL PANGAN*, 22(4), 287–298.
- Jenkins, G. P., & Harberger, A. C. (2018). Cost-benefit analysis for investment decisions. *Cambridge Resources International Incorporated*.
- Keen, M. (2001). Preferential regimes can make tax competition less harmful. *National Tax Journal*, 54(4), 757–762.
- Khizazi, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Produktivitas Perusahaan Manufaktur.
- Madani, D. (1999). *A review of the role and impact of export processing zones*. Available at SSRN 629169.
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *The Review of Economic Studies*, 38(2), 175–208.
- Nugroho, A., Amir, H., Wicaksono, E., Woroutami, A., Nugroho, S., Baihaqi, W., Yulianto, T., Riza, Y., & Nabila, A. (2018). *The Economic Contribution of Bonded Zone in Indonesia. Strenghtening Regional and Local Economies*, 1125–1135.
- Nurcahyo, M. A., & Purwana, A. S. (2021). Pengaruh karakteristik perusahaan kawasan berikat terhadap keuntungan perusahaan (study kasus pada KPPBC XYZ). *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1), 39–62.
- Paryadi, D., & Salam, A. R. (2018). Dampak Kerja Sama Perdagangan Indonesia dengan Eurasian Economic Union (EAEU) terhadap Perekonomian Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 12(2), 161–180.
- Putri, D. R. P., & Faradina, R. (2023). Kajian Kebijakan Hilirisasi Industri Pada Perizinan Kawasan Berikat. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 237–259.
- Ratiyah, R., Hartanti, H., & Feranika, Y. (2021). Analisa Penerapan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Timur. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1).
- Saputra, J. E. (2023). Tinjauan Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat Pada Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Subang Tahun 2022. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 583–593.
- Situmorang, E. (2020). *Fiscal Facilities to Improve Export Performance*. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 1(1), 125–133.

- Syafi'i, M., Wati, L. N., & Priyati, R. Y. (2023). *Pengaruh Fasilitas Kepabeanan Terhadap Nilai Ekspor Dan Kinerja Keuangan Perusahaan*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 8(1), 63–76.
- Wicaksono, T. Y., & Mangunsong, C. (2021). *Export-Promotion Policies and the Performance of Firms: Evidence from Bonded Zones in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 1–41. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1866745>
- Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). *Tax incentives for business investment: a primer for policy makers in developing countries*. World Development, 30(9), 1497–1516.